

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2015 - 2019

VISI : **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT**
MISI 3 : **Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat**

Tujuan 1 : **Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan**

Indikator Kinerja Tujuan :

1
2

Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Sasaran		Satuan	Tahun Dasar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	SKPD Pelaksana
Uraian	Indikator Kinerja									
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan		93,99	95	97	99	100	100	100	Dispenduk & Capil
	1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%								
	2 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	81,88	89	93	95	100	100	100	Dispenduk & Capil
	3 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	84,03	86	87	89	90	90	90	Dispenduk & Capil
	4 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%	0,36	25	45	65	70	73	75	Dispenduk & Capil
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa									Bagian Humas
	1 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:									
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12x setahun	312	316	320	324	328	332	336	Bagian Humas
	b. Media baru seperti website (media online);	Setiap hari	2160	2185	2210	2235	2260	2285	2320	Bagian Humas
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12x setahun	12	12	12	12	12	12	12	Bagian Humas
	d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;	12x setahun setiap kecamatan	34	34	34	34	34	34	34	Bagian Humas
	e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12x setahun	66	71	75	81	89	94	98	Bagian Humas

Sasaran		Satuan	Tahun Dasar							SKPD Pelaksana		
Uraian	Indikator Kinerja			2014	2015	2016	2017	2018	2019			
	4	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Sosial	
	5	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100	Kantor Sosial	
	6	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	1,45	1,45	2,90	4,30	4,90	5,40	6,00	Kantor Sosial	
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN												
8	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan	1	Prosentase jumlah LHP reguler dibanding jumlah target obyek pemeriksaan	%	90	90	90	92	94	96	98	Inspektorat
		2	Prosentase jumlah LHP dengan tujuan tertentu dibanding jumlah target obyek pemeriksaaan	%	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
		3	Prosentase jumlah kasus dan pengaduan yang ditangani	%	90	90	90	92	94	96	98	Inspektorat
		4	Prosentase jumlah ijin perkawinan dan perceraian yang diproses dibanding jumlah ijin perkawinan dan perceraian yang masuk	%	90	90	90	92	94	96	98	Inspektorat
		5	Prosentase jumlah LHR dibanding jumlah target review	%	100	100	100	100	100	100	100	
		6	prosentase jumlah LHE dan LHM dibanding jumlah target evaluasi dan monitoring	%	100	100	100	100	100	100	100	
		7	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti	%	70	70	70	75	80	85	90	

Sasaran		Satuan	Tahun Dasar							SKPD Pelaksana			
Uraian	Indikator Kinerja			2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		8	Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan/audit lembaga pemeriksa lainnya yang selesai ditindaklanjuti	%	70	70	70	75	80	85	85	Inspektorat	
9	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	1	Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKK LPPD)	tepat waktu/ tidak	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	Bagian Tata Pemerintahan	
		2	Jumlah Raperda yang diserahkan ke DPRD	Raperda	10	25	15	15	15	15	15	15	Bagian Hukum
10	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1	Laporan keuangan tersusun tepat waktu	ya/tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	DPKD	
		2	APBD ditetapkan tepat waktu	tepat/tidak	tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	DPKD
		3	Prosentase peningkatan PAD	%	6,0	12,2	10,9	9,8	8,9	8,2	7,6	7,6	DPKD
		4	% SKPD yang sdh baik manajemen assetnya	%	87	89	90	92	93	94	96	96	DPKD
11	Meningkatnya peran legislatif dalam tugas pemerintahan	1	Prosentase prolegda yang ditetapkan menjadi	%	56	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
		2	Efektifitas penyusunan, pelaksanaan, perubahan dan pertanggungjawaban APBD	%	50	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
		3	Prosentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
12	Meningkatnya Pengelolaan Aparatur yang Profesional	1	Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai jenjangnya	%	80,60	81,18	81,74	82,26	86,09	86,47	87,88	87,88	Kan Diklat
		2	Rasio jabatan yang terisi	%	84,63	86	88	90	92	94	96	96	B K D
		3	Rasio Pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal	%	85,00	88	90	92	94	96	98	98	B K D
		4	Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	83	86	89	91	93	95	97	97	B K D
		5	Kesesuaian SOTK SKPD dengan pedoman/ peraturan tentang SOTK	%	65	65	70	75	80	85	90	90	90

Sasaran		Satuan	Tahun Dasar							SKPD Pelaksana		
Uraian	Indikator Kinerja			2014	2015	2016	2017	2018	2019			
13	Meningkatnya kerjasama Daerah	1	Jumlah MOU Kerjasama dengan Daerah Lain dan Pihak Ketiga	Buah	10	12	12	12	15	15	15	Bagian Tata Pemerintahan
14	Meningkatnya Akuntabilitas Pengadaan Barang dan	1	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Bagian Pembangunan
		2	Petugas yang lulus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Orang	97	97	115	135	155	175	200	Kantor Diklat